

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat di zaman saat ini, perlu memanfaatkan teknologi sebagai salah satu alat yang membutuhkan untuk berkomunikasi sosial. Yang dimana komunikasi sangat penting dalam suatu memperkuat hubungan dan bisa menjadi lebih kuat jika terdapat komunikasi yang sangat efektif antara suatu pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut dengan dapat memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi, dapat menciptakan suasana bersosialisasi yang positif bagi semua pihak yang terlibat (Ajinegoro & Kurniawan, 2023). Media sosial kini menjadi salah satu platform penting dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasi tersebut bisa berupa pemberitahuan, pertanyaan, laporan, atau kesimpulan yang ingin disampaikan kepada pihak lain, baik perorangan, organisasi, maupun masyarakat. Media sosial yang memiliki peran inti sebagai penyebar informasi atau berita kepada publik merupakan bagian dari media massa (ALAMSYAH, 2021). Pada perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi dianggap sebagai kebutuhan dasar setiap individu untuk mendukung pengembangan diri dan lingkungan sosialnya, serta menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Didalam perusahaan atau organisasi sangat membutuhkan keberadaan Humas, terutama apabila suatu perusahaan tersebut sering terjadinya interaksi kepada publik. Dengan itu peranan humas bisa memberikan suatu informasi yang terbuka untuk publik, agar publik mengetahui apa saja tugas dan kepentingan perusahaan tersebut. Dimana organisasi tersebut berinteraksi dengan publik luas, sehingga tugas humas bisa menunjang setiap kebijakan kebijakan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Keberadaan humas erat

hubungannya dengan perkembangan sosial di dalam organisasi, sebagai usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan masyarakat melalui proses komunikasi timbal balik atau dua arah.

Menurut Coulsin – Thomas memberikan pendapatnya mengenai humas sebagai proses atau kegiatan terencana yang mempunyai tujuan untuk menjalin komunikasi antara perusahaan dan pihak luar perusahaan. Dimana pihak luar bisa dimaknai sebagai masyarakat ataupun pihak lain yang menjalin hubungan dengan perusahaan terkait. Humas harus bisa menciptakan ketertarikan dan pengertian publik dalam segala situasi, yang bisa berpengaruh besar dalam suatu organisasi atau lembaga dengan menggunakan berbagai macam strategi kehumasan, hal ini bisa menjadi cukup efektif. Masyarakat mungkin tidak mengerti tentang suatu situasi yang dialami oleh organisasi, maka Humas berperan untuk bisa menjelaskan situasi tersebut dengan informasi yang mudah untuk dipahami publik. Peran Humas bukan hanya dibutuhkan oleh organisasi profit ataupun perusahaan saja, namun humas juga dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Karena dengan adanya praktisi Humas dalam instansi pemerintah, mereka bisa memberikan informasi dan menjelaskan situasi mereka terhadap masyarakat, yang akan meningkatkan citra positif mereka di masyarakat.

Dalam meningkatkan citra suatu lembaga pemerintahan, yang dimana melibatkan humas. Humas adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan publik. Oleh karena itu, peran humas menjadi aspek utama yang harus diperhatikan, karena humas memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan citra perusahaan (Agnita Yolanda, DRA. Nurismilida, 2021:4). Maka humas adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan citra pemerintahan. Untuk mencapai reputasi dan pencapaian yang baik merupakan tujuan perusahaan melalui kegiatan kehumasan. Apabila suatu citra pemerintahan bersifat positif, maka akan memberikan suatu dampak yang sangat positif pula terhadap perkembangan suatu perusahaan. Secara umum, setiap organisasi berupaya untuk membangun citra positif di mata masyarakat atau publik. Jika citra organisasi

dinilai buruk oleh masyarakat, maka perkembangan organisasi tersebut sulit untuk dicapai. Citra organisasi terbentuk melalui informasi yang diterima oleh individu dari berbagai sumber (Sri Rezeki, 2021:78). Membangun, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan bukanlah tugas yang mudah, maka di perlukan pemahaman tentang bagaimana peran humas untuk meningkatkan citra pemerintahan melalui kegiatan harian yang berlangsung. Citra positif tidak dapat tercipta secara mudah bagi suatu pemerintahan. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintahan dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan persepsi yang sangat positif dan citra baik bagi pemerintah. Citra merupakan gambaran yang diterima masyarakat berdasarkan keseluruhan pesan yang diterima berdasarkan pengalaman komunikasi dan dirasakan langsung. Citra positif yang dibangun perusahaan dapat membangun kepercayaan terhadap publik (Besar, 2016).

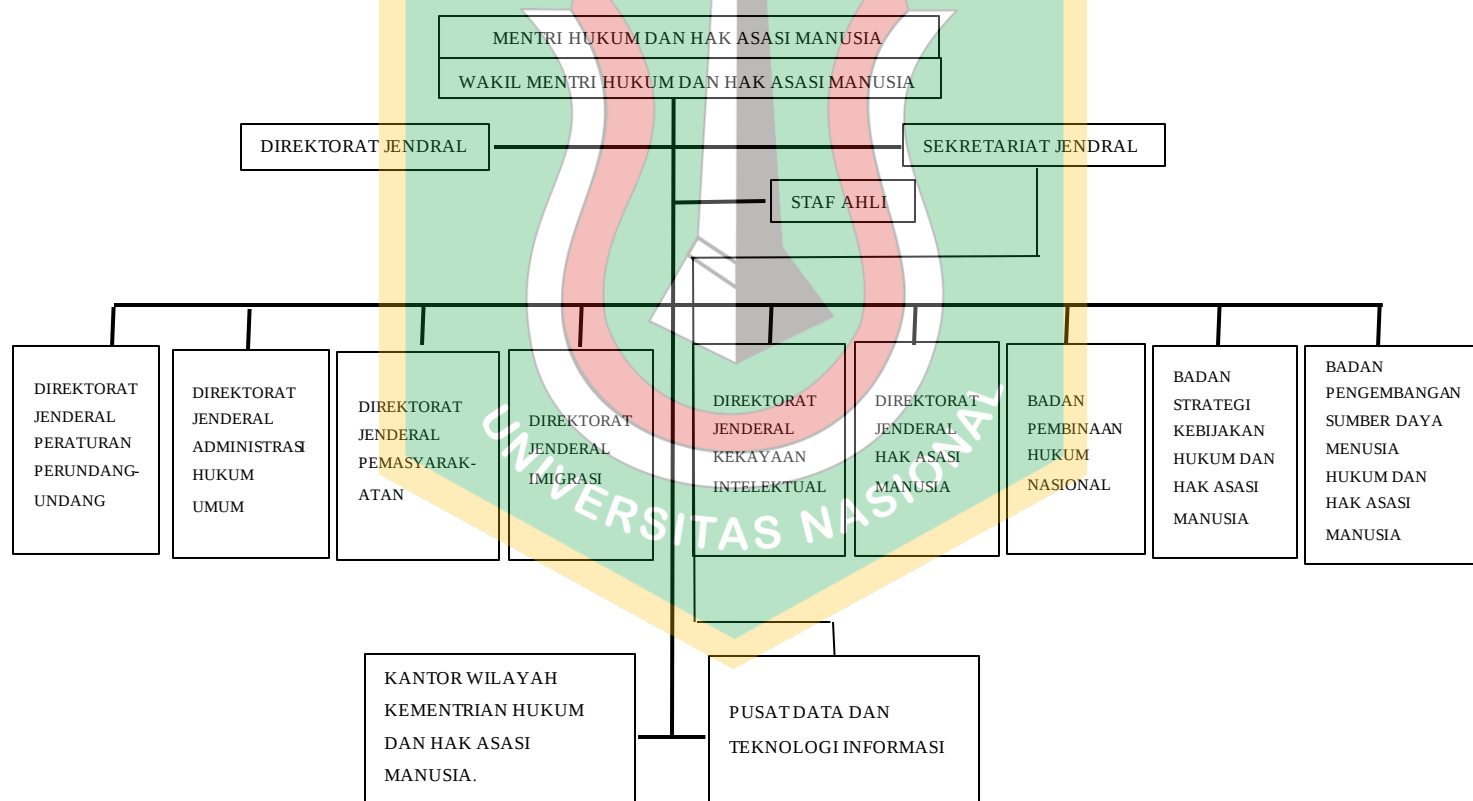


Table 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sumber : Pemenuhan RI Nomer 28 Tahun 2023

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, merupakan salah satu unit pemerintahan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Unit pemerintahan yang di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM terdapat 17 Unit : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Staf Ahli Bidang Sosial, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Yang dimana setiap unit di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM memiliki humas tersendiri sehingga berfokus pada peranan humas tersendiri.

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan di bidang Hukum dan HAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Peran tersebut tercermin dalam tugas dan fungsi badan ini sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2023. Badan Strategi Kebijakan bertanggung jawab menyelenggarakan perumusan, penyusunan, serta pemberian rekomendasi strategis di bidang Hukum dan HAM. Salah satu tugas utamanya adalah merumuskan kebijakan teknis, menyusun rencana dan program analisis, serta memberikan rekomendasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Tujuannya dengan untuk mendukung pemerintahan dalam dapat membuat kebijakan yang berdasarkan suatu prinsip keadilan, penghormatan HAM dan tata kelola hukum yang baik. Meskipun memiliki peran strategis, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM memiliki beberapa permasalahan yang dimana kurang populernya Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di bandingkan dengan unit di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang dimana BSKKUMHAM masih belum banyak

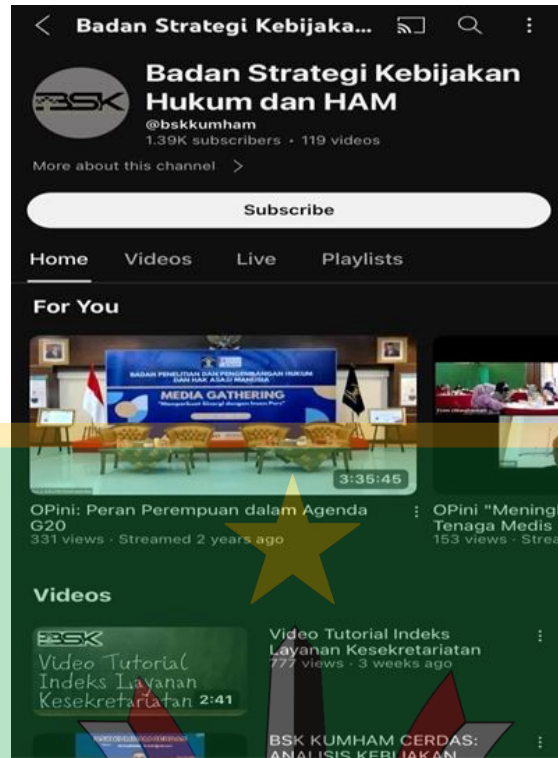
dikenal di masyarakat luas. Dikarenakan masyarakat umumnya lebih mengenal unit-unit yang lebih langsung berhubungan dengan kehidupan atau kebutuhan sehari-hari mereka. Komunikasi yang kurang maksimal juga menjadi salah satu kurang populer dikarenakan informasi tugas dan fungsi BSKKUMHAM sering kali masyarakat kurang paham tentang apa saja fungsi dan tugasnya, sehingga masyarakat umum kurang memahami peran Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM tersebut. Dan juga BSKKUMHAM lebih berfokus pada aspek suatu pengawasan internal dan pembinaan lembaga-lembaga hukum yang ada. Oleh karena itu, peran BSKKUMHAM tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan unit-unit lain seperti Direktorat Jendral Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum yang dimana lebih sering terlibat langsung dengan pelayanan publik sehingga publik lebih mengenal unit-unit tersebut.

Dengan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan humas pemerintahan dalam meningkatkan citra melalui media sosial instagram. Media sosial yang dimana saat ini telah menjadikan alat komunikasi yang penting di era digital, termasuk pada media sosial pemerintahan. Instagram menjadi salah satu platform media sosial yang sangat populer, yang dimana menawarkan berbagai ruang untuk membangun citra yang positif melalui beberapa konten dan postingan yang menarik (Noventa et al., 2023). Pada pemerintahan, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang dimana memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan kebijakan hukum dan HAM yang dapat dipahami dengan baik oleh publik. Oleh karena itu kegiatan publikasi humas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM harus turun langsung ke lapangan mengikuti kegiatan pemerintahan dengan membuat dokumen yang nantinya akan di posting melalui media sosial instagram, facebook dan youtube, yang bertujuan akan di publikasikan untuk publik sejauh mana program program yang telah di laksanakan sehingga publik mengetahuinya (Naningsih & P, 2022).

Dengan dapat mengidentifikasi apa saja platform-platform yang untuk saat ini yang banyak di minati publik untuk mudah menyebarkan

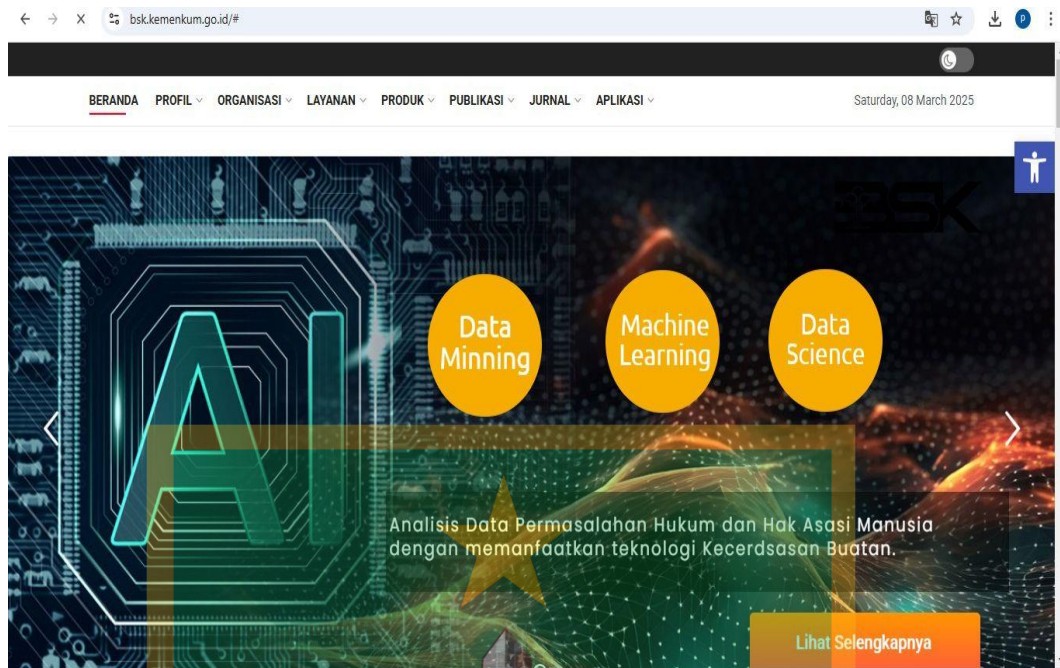
informasi. Maka salah satunya adalah media sosial Instagram yang dimana banyak memberikan banyak fitur yang bisa memberikan kemudahan bagi publik untuk mendapatkan berbagai informasi yang di sebar. Salah satu akun yang menggunakan platform Instagram untuk menemukan berbagai suatu informasi adalah akun instagram @BSKKUMHAM. Dimana akun media instagram @BSKKUMHAM merupakan sebuah akun penyebaran suatu informasi yang berguna untuk menyajikan seputar kegiatan harian di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Dengan memanfaatkan akun media sosial Instargam @BSKKUMHAM yang dimana akun instagram lebih aktif di bandingkan dengan akun media sosial lainnya yang seperti youtube dan facebook. Dengan ini maka bisa terlihat dari media sosial Instagram @BSKKUMHAM yang memposting berapa kegiatan harian pemerintahan. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, akun media instagram yang dimana lebih banyak menyampaikan suatu informasi kegiatan yang sedang berlangsung di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.





Gambar 1.1 Profile Akun Youtube BSKKUMHAM
Sumber : Youtube @BSKKUMHAM

Akun media sosial youtube BSKKUMHAM dimana akun tersebut kurang aktif di bandingkan dengan akun media sosial instagram. Dengan itu dapat di simpulkan bahwa akun media sosial youtube BSKKUMHAM tidak memberikan informasi keseharian pemerintahan dan kegiatan sehari-hari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Akun youtube BSKKUMHAM terakhir membagikan informasi pada 2 tahun terakhir. Sehingga informasi yang di berikan tidak menarik dan kurang dilirik oleh publik dikarenakan kurangnya inovasi. Kurang aktifnya akun youtube dalam menyampaikan informasi kepada publik, maka publik kurang melihat akun tersebut di karenakan unggahan yang rendah dan minim konten yang relevan membuat informasi yang disampaikan tidak cukup optimal bagi publik.



Gambar 1.2 Profil Website BSKKUMHAM
Sumber : bsk.kumham.go.id

Website BSKKUMHAM yang dimana untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan citra kurang efektif. Dikarenakan website Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang bersifat statis yang berarti pada website tersebut digunakan untuk menyediakan informasi secara satu arah saja sehingga tidak adanya interaksi dua arah. Yang dibandingkan dengan media sosial Instagram yang dimana sangat memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pemerintahan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dengan publik luas dengan memanfaatkan komentar dan dm (*Direct Message*). Maka hal tersebut membuat website yang digunakan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM kurang efektif dalam menjalin komunikasi aktif dengan publik luas.

Serta pada penggunaan website dalam menyebarkan informasi serta meningkatkan citra sangat kurang efektif dikarenakan dalam update terkait informasi website lebih lambat dalam penyebaran terhadap masyarakat di bandingkan dengan menggunakan instagram dalam penyebaran informasi nya lebih cepat di bandingkan website. Serta informasi yang dibagikan di website Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM kurang menarik bagi publik luas dikarenakan publik lebih tertarik pada format visual dan interaktif seperti pada instagram.

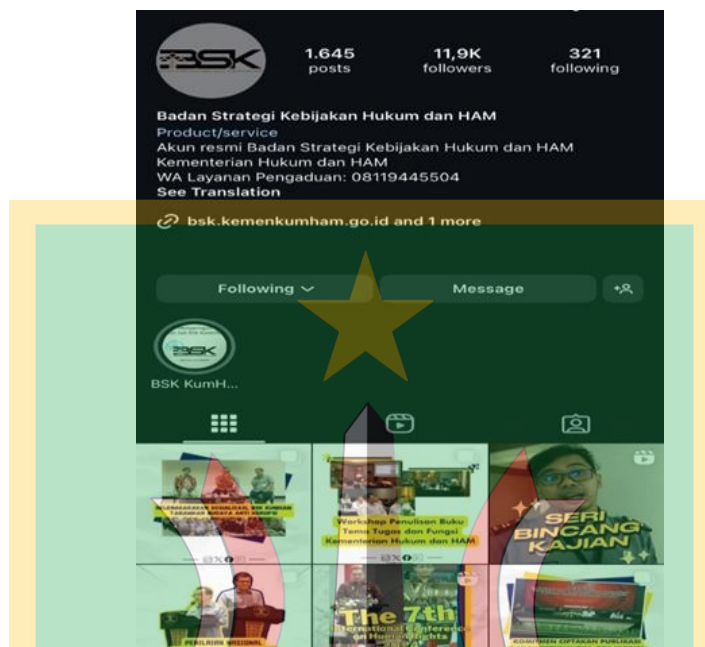


Sumber : Facebook @BSKKUMHAM
 Gambar 1. 2 Profile Akun Facebook BKKUMHAM

Akun media sosial facebook BSKKUMHAM juga cukup kurang aktif, yang di karenakan keterbatasan jumlah pengikut facebook tersebut. Yang dimana akun facebook BSKKUMHAM menyebarkan suatu informasi juga cukup kurang optimal dikarenakan informasi yang kurang memotivasi dan tidak menyesuaikan trend media sosial. Informasi yang disampaikan melalui akun Facebook juga cukup kurang efektif karena tidak relevan dengan kebutuhan dan minat audiens atau publik, sehingga tidak terjadinya tanggapan terhadap masyarakat yang melihat akun facebook tersebut. Pada akun Facebook tersebut yang dimana hanya memberikan beberapa informasi kegiatan sehari-hari saja dan juga tanpa ada penjelasan yang lebih rinci terkait informasi yang di berikan terhadap publik sehingga publik kurang paham tentang apa yang sedang di sampaikan.

Maka dengan itu sifat facebook lebih dominan digunakan publik untuk berkomunikasi personal dan komunitas tertentu yang membuat penyebaran informasi memerlukan komunikasi khusus agar dapat diterima secara luas dan lebih relevan bagi publik. Oleh karna itu, sangat diperlukan pengoptimalisasi dalam pemanfaatan facebook sebagai media penyebaran informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan sesuai dengan

perkembangan pola digital masyarakat. Dengan demikian jika dalam meningkatkan citra melalui media sosial facebook kurang optimal dikarenakan publik kurang tertarik menggunakan media sosial facebook dikarenakan tidak terlalu update dalam fitur-fitur yang dibagikan.



Gambar 1.3 Profile Akun Instagram BSKKUMHAM
Sumber : Instagram @BSKKUMHAM

Akun media sosial instagram BSKKUMHAM yang dimana memiliki 11.900 pengikut (followers), dapat disimpulkan jumlah tersebut cukup banyak sehingga dapat menarik publik untuk mencari atau mendapatkan suatu informasi melalui media sosial instagram, akun instagram BSKKUMHAM juga telah membagikan postingan sebanyak 1.655 postingan dapat terbilang cukup sangat aktif dan inovatif dalam menyampaikan suatu informasi kepada publik luas. Dengan rutin mengunggah informasi keseharian Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yang menarik, informatif dan relevan dengan publik, sehingga akun tersebut dapat berhasil memberikan interaksi antara publik dengan pemerintah dan juga dapat membangun interaksi yang kuat dengan para pengikut di akun Instagram BSKKUMHAM. Selain itu, penggunaan fitur-fitur kreatif akun instagram juga banyak dapat menyebarkan informasi kegiatan sehari-hari BSKKUMHAM seperti memposting di Stories yang berguna untuk memberikan informasi kegiatan

yang bertahan hanya 24 jam yang bertujuan untuk adanya interaksi atau sesi tanya jawab melalui DM, IGTV yang berguna untuk membagikan video dengan durasi panjang yang sangat cocok untuk konten edukasi atau pemaparan yang membutuhkan penjelasan yang panjang, dan Kolom komentar humas memanfaatkan kolom komentar untuk adanya interaksi dua arah yang ada di setiap postingan yang dibagikan, *Direct Message* (DM) yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau keluhan dari publik luas secara personal sehingga tidak bisa dibaca orang lain. Dan juga membuat konten-konten yang terkini sehingga publik memiliki pandangan terhadap akun tersebut sehingga terjadinya interaksi melalui komentar terhadap postingan yang dibagikan melalui media sosial Instagram BSKKUMHAM. Pendekatan komunikasi yang sangat moderen dan juga mudah dipahami membuat akun Instagram terus bertambah pengikut, sekaligus juga menjadikan sumber informasi yang dapat dipercaya oleh publik atau masyarakat luas.



Gambar 1.4 Kegiatan BSKKUMHAM
Sumber : Instagram @bskkumham

Dari gambar di atas terdapat kegiatan dengan berjudul “Selenggarakan Sosialisasi, BSK KUMHAM Tanamkan Budaya Anti Korupsi” yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang di posting melalui akun Instagram BSKKUMHAM yang bertujuan untuk menginformasikan kepada publik tentang kegiatan yang berlangsung. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan

HAM telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dan Sosialisasi Pemenkumham Nomer 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementraian Hukum dan HAM. Dengan mempostingnya di akun media sosial agar terinformasikan kegiatan kegiatan apa saja yang di lakukan di pemerintahan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.



Gambar 1.5 Kegiatan Harian BSKKUMHAM
Sumber : Instagram @BSKKUMHAM

Melalui media Instagram BSKKUMHAM dapat mempublikasikan berbagai kegiatan resmi dan non-resmi, seperti acara rapat, kunjungan kerja, dan kegiatan internal. Yang dimana memastikan bahwa informasi tentang kegiatan sehari-hari yang mudah diakses oleh publik. Dengan berbagi informasi melalui kegiatan secara rutin, akun Instagram BSKKUMHAM lebih meningkatkan transparansi mengenai apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan tersebut, hal tersebut juga membantu dalam membangun kepercayaan terhadap publik.

Berdasarkan pemaparan gambar diatas menjelaskan tentang kegiatan harian yang berlangsung di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Maka pada gambar diatas menjelaskan tentang kegiatan harian peliputan Penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementrian Hukum dan HAM, Arahan Kepala Badan Strategi Kebijakan

Hukum dan HAM selaku ketua Steering Committee Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan HAM Dan Analisis Urgensi Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomer 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum serta kegiatan yang sedang berlangsung di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM lainnya pada postingan yang di bagikan.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, peneliti bermaksud mengkaji pengelolaan akun sosial Instagram yang dilakukan Humas BSKKUMHAM untuk berkomunikasi dengan publik. Yang diaman agar lebih dikenal oleh masyarakat luas perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya kebijakan hukum dan ham serta peranan humas dalam mencapainya. Yang dimana akun Instagram BSKKUMHAM juga dapat digunakan untuk mempromosikan program – program baru, kebijakan serta kampanye yang di keluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga publik lebih mudah mendapatkan informasi. Serta juga membantu masyarakat lebih memahami fungsi serta peran BSKKUMHAM tersebut dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, berguna untuk menyebarluaskan informasi hukum dan hak asasi manusia kepada publik sehingga meningkatkan kesadaran hukum publik. Dengan menyebarkan sisi positif dari suatu kegiatan yang di lakukan di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM seperti inovasi, penghargaan dan inisiatif, citra positif lembaga dapat memperkuat citra positif di mata publik. Dengan menyebarkan informasi terkait badan strategi kebijakan hukum dan ham menggunakan berbagai platform sangat efektif yang dimana membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hukum dan ham. Dengan pendekatan menggunakan media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih luas, membangun hubungan yang lebih dekat dengan publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti menemukan permasalahan (problem statement) yang nantinya akan menjadi

bahas penelitian sebagai berikut :

Bagaimana peranan humas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dalam memanfaatkan media sosial BSKKUMHAM terkait kegiatan Pemerintahan untuk meningkatkan citra ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana peranan humas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dalam memanfaatkan media sosial BSKKUMHAM untuk meningkatkan citra melalui kegiatan Pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini dengan judul “Peranan Humas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Dalam Meningkatkan Citra Melalui Media Sosial Innstagram @BSKKUMHAM” Dapat di uraikan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan sebagai wadah wawasan dan refrensi dalam mengembangkan ilmu tentang aktivitas kehumasan, khususnya mengenai peran Humas dalam meningkatkan citra pemerintah melalui pemanfaatan media sosial @BSKKUMHAM dalam penyebaran kegiatan kegiatan yang di lakukan Badan Strategi Kebijakab Hukum dan HAM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pada hasil penelitiann ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Humas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM untuk lebih efektif dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang dapat meningkatkan citra pemerintah. Dan pada penelitian ini juga membantu publik mendapatkan informasi lebihtransparan dan akurat tentang kegiatan yang sedang berlangsung di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan pembahasan yang terstruktur, Maka Penelitian ini memerlukan menyusun sistematika yang dimana memudahkan untuk memahami gambaran pada skripsi ini.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan bagaimana tentang latar belakang, manfaat penelitian dan juga tujuan penelitian. Pada penelitiann ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pentingnya peran humas dalam lembaga pemerintahan, pentingnya memberikan informasi kepada publik tentang kegiatan yang di lakukan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melalui media sosial sebagai sarana komunikasi publik.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dipakai untuk acuan menilai suatu persamaan serta perbandingan bagi peneliti, teori, konsep dan juga kerangka berfikir yang relevan bagi penelitian tersebut.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III metodologi yang digunakan dalam penelitian, mencakup teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta untuk memastikan keabsahan data serta lokasi dan jadwal penelitian yang berlokasi di kantor di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menjelaskan bagaimana gambaran sutau objek penelitian, biodata suatu informan, dan juga suatu hasil penelitian , yang terakhir suatu Analisis terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil dari penelitian penulis.